

BAB III

PERANAN INDONESIA DALAM KERJASAMA NEW ASIAN AFRICAN STRATEGIC PARTNERSHIP

Pada bab ini akan membahas peranan Indonesia dalam kerjasama New Asian African Strategic Partnership (NAASP) yang akan menguraikan tentang haluan politik luar negeri Indonesia serta kondisi hubungan Indonesia-Afrika mulai dari KAA dan Indonesia sebagai pelopor pembentukan NAASP dan peranan Indonesia dalam NAASP.

A. Haluan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik Luar Negeri adalah kumpulan kebijakan suatu Negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar Negeri nya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk suatu kurun waktu yang sedang dihadapi lazim disebut kepentingan nasional.³⁵ Pada hakekatnya ia merupakan suatu pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologisnya. Respon tersebut mempunyai latar belakang yang berinteraksi dengan persepsi, pengalaman, kekayaan alam serta kebudayaan politik yang biasanya dimanifestasikan sebagai falsafah bangsa dan diakomodasikan dalam konsitusi.

Kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sejarah nasional, kondisi geografis, kependudukan dan keamanan nasional. Faktor-faktor ini mendorong Indonesia untuk menggunakan kebijakan luar negeri

³⁵ Suryana, Daryamasranta, *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Bandung, Remaja Karya, 1984

yang bebas aktif.³⁶ Bebas aktif adalah politik luar negeri Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sila ke dua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai perwujudan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu bahwa pemerintah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁷ Politik bebas aktif ini jugalah yang diperkenalkan pertama kali oleh wakil presiden Mohammad Hatta pada tahun 1948. Bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh politik Negara asing atau Blok Negara-Negara tertentu, atau Negara-Negara Adikuasa (*super power*). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormati kedaulatan Negara lain.

Jadi politik luar negeri yang bebas aktif, mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa dari kungkungan penjajahan, mempererat hubungan dengan bangsa-bangsa lain dengan sama derajat, tegak sama tinggi dan duduk sama rendah. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif dilaksanakan secara konsekuen dan diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan disegala bidang.³⁸ Dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut, Indonesia mematuhi beberapa panduan sebagai berikut ini:

³⁶ Djumadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Politik Luar Negeri Indonesia*. Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2008. Hal 1

³⁷ Djumadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Politik Luar Negeri Indonesia*. Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2008. Hal 1

1. Pancasila, sebagai ideologi Negara
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Ketahanan nasional, yang didasarkan pada wawasan nusantara
4. Program pemerintah atau rencana pembangunan

Panduan-panduan tersebut dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang, terutama Undang-Undang no. 37/1999 tentang hubungan luar negeri. Keputusan Presiden (KEPRES) No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPM) 2004-2009, telah digaris bawahi bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah untuk memperkuat kebijakan luar negeri dan meningkatkan kerjasama internasional. Prioritas tersebut dipahami akan dapat meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan juga membantu menciptakan dunia yang damai; serta untuk mewujudkan/ menjaga citra positif Indonesia dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang selanjutnya akan mendorong penciptaan tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik.

Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah mengabdikan kepada tujuan nasional. Adapun tujuan nasional jangka panjang adalah sebagai mana termaktub dalam alinea keempat UUD 45 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan

dalam waktu yang singkat.³⁹ Untuk tercapai tujuan-tujuan tersebut, maka dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Agenda peningkatan kualitas diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional sebagai upaya untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasional, termasuk melakukan penyelesaian masalah-masalah perbatasan dan perlindungan kepentingan masyarakat Indonesia di luar negeri
2. Melanjutkan komitmen Indonesia dalam menjaga kerjasama antar Negara melalui kerjasama internasional, bilateral, multilateral, dan kerjasama-kerjasama regional lainnya.
3. Meningkatkan peranan dan dukungan masyarakat internasional yang lebih besar terhadap Indonesia guna pemenuhan/penciptaan tujuan-tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan kepada pendekatan strategis yang menekankan pendekatan lingkaran konsentris. Pendekatan ini digunakan dengan mempertimbangkan kedekatan geografis dan pengaruh dari lingkungan eksternal terhadap Indonesia. Lingkungan terdekat akan menciptakan dampak yang relatif besar pada setiap aspek situasi dalam negeri di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa situasi dalam negeri dan luar negeri memiliki pengaruh dan keterkaitan pada pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia.⁴⁰

ASEAN adalah sebagai fokus pencapaian kebijakan luar negeri di kawasan. Sehingga ASEAN ditempatkan Pada lingkaran dalam dimana terdapat mekanisme kelembagaan pendukungnya. Khusus bagi Indonesia, berbagai inisiatif

³⁹ G. R. ... Politik Luar Negeri Republik Indonesia Bandung: Remaja Karya, 1984

pengembangan pasar modal ASEAN agar lebih likuid dan bila perlu diselaraskan dengan agenda nasional.⁴¹ Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk memposisikan ASEAN sebagai pusat dari beragam kerjasama internasional di Asia dan Pasifik. Dalam kaitan ini, kebijakan luar negeri di Asia Tenggara terkonsentrasi pada perluasan, pengintegrasian dan peningkatan struktur dan mekanisme ASEAN. Contoh-contoh keberhasilan dalam upaya ini adalah perjanjian pembentukan secara bertahap masyarakat ASEAN melalui tiga pilarnya yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN, Masyarakat Keamanan ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Pada lingkaran yang lebih luas, kebijakan luar negeri Indonesia juga telah ditujukan untuk membangun, mengembangkan dan memperkuat dialog dalam kerangka kerjasama dengan Negara-Negara Asia Timur. Dalam hal ini penerapan kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah regional ditujukan untuk membangun mekanisme dialog dan kerjasama kelembagaan yang mungkin untuk dilaksanakan dan saling menguntungkan. Strategi yang sama juga diterapkan pada lingkungan Negara-Negara Pasifik, India dan jangkauan kawasan yang lebih luas yaitu Asia-Afrika.⁴²

⁴¹ D. H. Indonesia, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*, Jakarta: Gramedia, Hal. 240.

B. Kondisi Hubungan Indonesia-Afrika

Pada Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang menyebutkan, bahwa bangsa Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menjadi landasan politik luar negeri Bebas Aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok (kekuatan). Sedangkan Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita PBB. Salah satu bukti peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia adalah memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA).

Bangsa-bangsa Asia – Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah yakni sama-sama menjadi sasaran penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Dan kemudian Semakin meningkatnya kesadaran Bangsa-Bangsa Asia-Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan misalnya, Yaman sedang berjuang membebaskan Aden dari kekuasaan Inggris, Rakyat Aljazair, Tunisia, Maroko, Sudan, dan Kongo sedang membebaskan tanah airnya dari kekuasaan bangsa Eropa, dan lain-lain. Perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia II berakhir yakni situasi internasional diliputi kecemasan akibat adanya perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur. Diantara Bangsa-Bangsa Asia yang telah merdeka masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu, yang kemudian Rusia dan Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam masalah tersebut.

1. Pembentukan KAA dan Pendirian GNB

Ada 3 (tiga) masalah pokok yang dibicarakan dalam konferensi ini yaitu,

kegiatan ekonomi, kebudayaan dan politik. Dalam masalah politik dibicarakan juga

tentang soal hak asasi manusia, hak menentukan nasib sendiri, kolonialisme dan perlucutan senjata. Konferensi Asia- Afrika sendiri menghasilkan dasa sila Bandung yang kemudian dikenal juga sebagai semangat Bandung.⁴³ KAA merupakan suatu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dimana di dalam konferensi tersebut, Indonesia berlaku bebas, yang seperti dikatakan Hatta, bahwa bebas berarti tidak memihak blok manapun. Dan aktif yang berarti turut serta dalam menciptakan perdamaian abadi. Karena di dalam konferensi tersebut ditanamkan jiwa toleran yang mencakup prinsip untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghargai terhadap integritas dan kedaulatan negara lain, tidak turut campur tangan atas masalah domestik yang dihadapi negara lain, serta saling bekerja sama yang timbal balik. Maka KAA memiliki arti strategis terhadap politik luar negeri Indonesia, karena KAA merupakan bentuk perwujudan politik bebas aktif yang diusung oleh Indonesia, yakni menciptakan perdamaian dunia. Selain itu dalam konferensi ini, Indonesia dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara di Asia-Afrika. Landasan-landasan dalam politik luar negeri RI, yaitu kemerdekaan dan perdamaian coba diwujudkan oleh pemerintah dalam konferensi ini.

Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 Kepala Negara dan Kepala Pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja mencapai kemerdekaannya.⁴⁴ KAA ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya menformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tataran hubungan internasional.

⁴³ Wijdaja hal 23 25

⁴⁴ http://www.wikiwand.com/wiki/Daerah_Bandung_Dilantik_Tanggal_6_Juli_2012

KAA menyepakati 'Dasa Sila Bandung' yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan, dan dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB. Hampir semua Negara peserta konferensi Asia- Afrika, juga termasuk Negara Non Blok, sering juga disebut sebagai gerakan Negara Non Blok⁴⁵.

GNB berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia, 1-6 September 1961. KTT I GNB dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Srilanka, Congo, Cuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Lebanon, Mali, Morocco, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia dan Yugoslavia. Pada KTT I ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.⁴⁶

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB.⁴⁷ KAA tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung dan menghasilkan 'Dasa Sila Bandung' yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran dan kontribusi penting

⁴⁵ <http://tokoh.univpancasila.ac.id/?p=776> Dikutip Tanggal 6 Juli 2012

⁴⁶ *Op. cit*

⁴⁷ *Op. cit* Dikutip Tanggal 26 Juni 2012

Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai pentingnya GNB tidak sekedar dari peran yang selama ini dikonstruksikan, tetapi terlebih-lebih mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.⁴⁸

2. Pelopor Pembentukan NAASP

Hubungan politik antara Indonesia dan Afrika Selatan terjalin lama sejak sebelum pembukaan hubungan diplomatik. Indonesia mendukung the African National Congress (ANC) pada masa perjuangan melawan Apartheid, dan menjaga posisi ini terus menerus serta memberikan sanksi terhadap rezim Apartheid. Hubungan bilateral antara ANC dan Indonesia memberikan sebuah platform bagi Negara–Negara di Asia untuk berjuang melawan Apartheid.

Afrika Selatan dan Indonesia bekerjasama dalam menkoordinasikan kegiatan–kegiatan *New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) Kemitraan Strategis Asia-Afrika Baru*. Kedua negara juga memiliki mandat untuk menjadi *co-chair* Pertemuan Asia–Afrika yang dijadwalkan diselenggarakan di Afrika Selatan pada tahun 2010. Tanggung jawab sebagai tuan rumah bersama memberikan platform yang lain untuk hubungan dan pemahaman yang lebih dekat antara kedua Negara.⁴⁹

Pada tanggal 22-23 April 2005, Negara-Negara Asia dan Afrika memperbaharui solidaritas mereka yang telah berjalan lama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika 2005 di Jakarta. KTT AA tahun 2005 tersebut telah

⁴⁸ <http://www.deplu.go.id>. Dikutip Tanggal 6 Juli 2012

⁴⁹ <http://www.deplu.go.id>. Dikutip Tanggal 8 Juni 2012

menghasilkan beberapa kesepakatan akhir, yang terpenting adalah *Declaration on the New Asian African Strategic Partnership* (NAASP), *Joint Ministerial Statement on the New Asian African Strategic Partnership Plan of Action*; dan *Joint Asian African Leaders' Statement on Tsunami, Earthquake and other Natural Disasters*.⁵⁰ Deklarasi NAASP tersebut merupakan manifestasi dari pembentukan “jembatan” intrakawasan dengan komitmen kemitraan strategis baru antara Asia dan Afrika yang mencakup tiga pilar kerjasama, yaitu solidaritas politik, kerja sama ekonomi dan hubungan sosial budaya, yang di dalamnya mencakup mekanisme interaksi antar pemerintah, antar organisasi regional dan subregional serta antar masyarakat (*people-to-people contact*).⁵¹

KTT AA tahun 2005 dihadiri oleh perwakilan dari 106 negara Asia dan Afrika yang terdiri dari 54 negara Asia dan 52 Negara Afrika. KTT menyepakati sebuah mekanisme tindak lanjut untuk proses institusionalisasi melalui pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) setiap 4 tahun sekali yang dilaksanakan bersamaan dengan *co-chair* Pertemuan Asia–Afrika yang dijadwalkan diselenggarakan di Afrika Selatan pada tahun 2010. Tanggung jawab sebagai tuan rumah bersama memberikan platform yang lain untuk hubungan dan pemahaman yang lebih dekat antara kedua Negara.⁵²

Sejak tahun 2005 Indonesia dan Afrika Selatan menjadi Ketua Bersama (Indonesia dalam kurun waktu 2006-2010 telah berhasil melaksanakan 22 program di bawah kerangka kerjasama NAASP, antara lain: *Co- Chairs*) NAASP. Dalam

⁵⁰ <http://www.deplu.go.id>. Dikutip Tanggal 5 Juli 2012 20

⁵¹ <http://www.kemlu.go.id>. Dikutip pada Tanggal 06 Juli 2012

⁵² *Ibid*

mengemban tugas sebagai *Co-Chairs*, Indonesia telah berperan aktif dalam upaya mengembangkan NAASP. *NAASP-UNEP Workshop on Environmental Law and Policy* tahun 2006 *Asian African Forum on Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* tahun 2007, dan *Apprenticeship Program for Mozambican Farmers* tahun 2010.⁵³ Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi *NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* tahun 2008 yang dihadiri oleh 218 peserta dari 56 negara dan 3 organisasi internasional.

Komitmen bagi pengembangan NAASP juga dibagi bersama dengan negara-negara peserta NAASP yang lain. Menyebutkan beberapa diantaranya, Malaysia telah melaksanakan *Training Course for Diplomats* tahun 2007 dan *Training Course in Disaster Management* tahun 2008, serta China yang telah melaksanakan *The 5th Training Program for Staff from African Chambers* dan *China-Zambia Trade and Investment Forum*.⁵⁴ *Sectoral Ministerial* dan *Technical Meeting* lainnya apabila diperlukan.

Dengan pandangan untuk memberikan berbagai rekomendasi bagi KTT NAASP mendatang, *NAASP Senior Officials' Meeting* (SOM) diadakan di Jakarta pada tanggal 12-13 Oktober 2009. Pertemuan ini berhasil membahas beberapa agenda penting, khususnya usulan *the 8 Focus Areas of Cooperation* yang dimaksudkan sebagai mekanisme panduan untuk mengarahkan berbagai skema kerja sama di bawah kerangka NAASP yang telah dirumuskan dalam KTT AA 2005 ke dalam beberapa kegiatan yang realistis dan bersifat berorientasi pada hasil. Delapan bidang kerja sama yang telah disepakati dalam pertemuan ini yaitu: *Counter Terrorism*;

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

Combating Trans-national Organized Crime; Food Security; Energy Security; Small and Medium Enterprises; Tourism; Asian African Development University Network; serta Gender Equality and Women Empowerment. Beberapa negara Asia seperti Bangladesh, China, Jepang, Filipina, dan Thailand telah menunjukkan kesediaan untuk menjadi *Champion Countries* dari bidang kerjasama tersebut, berdampingan dengan *Champion Countries* dari negara Afrika. Indonesia sendiri menjadi *Champion Country* dari kawasan Asia bersama dengan Aljazair dari kawasan Afrika untuk bidang kerjasama *Counter-Terrorism*.⁵⁵

C. Komitmen dan Peranan Indonesia dalam NAASP

Kawasan Asia dan Afrika nampaknya terlalu penting jika hanya dilihat dari perspektif persaingan antara kekuatan-kekuatan ekonomi global. Negara-negara di kawasan ini secara kolektif juga memainkan peran besar dalam mengimbangi kekuatan negara-negara maju melalui sebuah kolaborasi politik di tingkat global, sebuah kolaborasi yang dibangun atas dasar solidaritas politik negara-negara berkembang. Indonesia juga turut mengambil bagian dalam kolaborasi politik ini. Kolaborasi ini menjadi alasan mengapa Indonesia selalu memperhatikan perkembangan di kawasan Asia dan Afrika secara lebih teratur.

Selain karena kedekatan dan solidaritas politik dengan kawasan Afrika dan Timur Tengah, kebijakan Indonesia di kawasan tersebut belakangan ini, juga dituntut untuk lebih pro-aktif untuk menangkap berbagai peluang yang tersedia di kawasan,

terutama di tengah semakin kuatnya kehadiran negara-negara kekuatan ekonomi global di kawasan tersebut.

Indonesia dalam hal ini telah selangkah lebih maju daripada negara-negara lainnya. Sebagai negara yang memiliki hubungan sejarah yang kental terhadap sebagian besar negara-negara di wilayah Asia dan Afrika, Indonesia telah membuktikan sekali lagi komitmennya dengan mengadakan KTT AA 2005 demi kemajuan dan perkembangan negara-negara berkembang. Oleh karena itu semenjak tahun 2006, Indonesia memainkan peran yang vital dalam kerjasama NAASP, sebagai bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya menjual “sejarah”.

1. Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi di Durban, Afrika Selatan 2006

Sebagai bentuk kerjasama yang konkrit antara negara-negara Asia – Afrika maka disepakatinya NAASP. Tidak seperti Dasasila Bandung yang dihasilkan pada KAA 1955, NAASP yang dilahirkan pada KTT AA 2005 lebih bersifat implementatif dan praktis. Hal tersebut dapat dilihat dari kelahirannya NAASP didasari dengan studi - studi perbandingan dan analisa hambatan-hambatan. Tujuannya jelas, yaitu untuk membangun wilayah Asia dan Afrika yang damai, sejahtera dan maju dengan cara bekerja sama antara pemerintah dan kontak antar masyarakat (*People to people contact*). Dewasa ini, NAASP telah menjadi kerangka kerja dalam membangun kerjasama dalam hubungan politik ekonomi dan sosial budaya Kerjasama ini terurai dalam list program yang disepakati pada saat Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi di Durban, Afrika Selatan pada tanggal 1-3 September 2006.⁵⁶ Pertemuan ini dibuka oleh kedua ketua bersama yaitu Indonesia dan Afrika Selatan. Namun setelah

pembukaan, pertemuan ini sempat dihentikan untuk mengatasi persetujuan antara kedua ketua permasalahan kehadiran Sahara Barat yang berstatus *Guest of host country*.

Kehadiran Sahara Barat tersebut diprotes keras oleh delegasi dari Maroko yang didukung oleh Senegal dan negara-negara Afrika yang berbahasa Perancis serta sebagian besar negara Arab dan Timur Tengah. Di sisi lain kehadiran Sahara Barat tersebut didukung oleh tuan rumah. Afrika Selatan, Aljazair, Suriah dan negara-negara Afrika lainnya yang berbahasa Inggris.⁵⁷ Negara-negara Asia lainnya melihat masalah tersebut merupakan masalah benua Afrika dan memilih untuk tidak berpendapat mengingat hal tersebut dapat semakin memperuncing perbedaan serta tidak ada tindakan Afrika Selatan dalam mengundang perwakilan dari Sahara Barat. Peringatan tersebut lebih dikarenakan status Sahara Barat masih menjadi perdebatan negara-negara benua Afrika sendiri. Namun peringatan Indonesia tersebut tidak diperhatikan oleh Afrika Selatan karena merasa sebagai tuan rumah, Afrika Selatan dapat memanfaatkan forum SOM ini untuk kepentingan politiknya sendiri di Afrika.⁵⁸

Pertemuan diawali dengan penyampaian laporan perkembangan atas apa yang telah dilakukan setelah pelaksanaan KTT Asia Afrika 2005. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa telah disusunnya matriks perkembangan NAASP. Program Asia-Africa Conference Capacity Building for Palestine dan Afro - Asia Satellite Communication yang telah dijajaki selama ini juga dilaporkan perkembangannya.

Perdebatan mengenai kehadiran Sahara Barat terus menjadi perbincangan

disebabkan oleh permasalahan ini. Untuk menengahi perdebatan tersebut dibentuklah komisi kecil *Friends of Co-Chairs* yang terdiri dari Indonesia Afrika Selatan, Lebanon, Namibia "Mesir, Filipina, Nigeria, India, Senegal, Caboru Ethiopia" Lesotho dan Ethiopia. Selanjutnya untuk mengakhiri perbedaan, Indonesia dan Afrika Selatan sepakat untuk mengakhiri perbedaan, Indonesia dan Afrika Selatan sepakat untuk tidak memasang bendera maupun nama peserta NAASP SOM.⁵⁹

Inti dari pertemuan di Durban terletak pada pembangunan kerangka kerjasama dalam 3 level yaitu level pejabat pemerintah (*Government to Government / G-to-G*) level organisasi Sub-Regional dan level G-to-G dibangun kerjasama dalam 3 bidang seperti yang tercantum dalam deklarasi NAASP yaitu bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.⁶⁰ Melalui pertemuan ini digaribawahi kerjasama pada bidang perdagangan, industri, investasi, keuangan, pariwisata, informasi teknologi, energi, kesehatan, transportasi, pertanian, sumber daya air dan perikanan.

Dalam implementasinya, negara anggota menyepakati 8 fokus kerjasama dalam kerangka NAASP pada Senior Officials' Meeting di Jakarta pada tanggal 12-13 Oktober 2009. Kedelapan bidang tersebut adalah ketersediaan pangan (India), ketersediaan energi (Kamerun), pariwisata (Thailand dan Kenya), SMEs (China Kamerun dan Kenya), counter terrorism (Indonesia dan Aljazair), *transnational organized crime* (Filipina dan Mesir), Asian-African Development University Network (AADUN) (Jepang dan Kamerun) dan pertemuan gender serta women

Usulan Indonesia mengenai *Asia-Africa Conference Capacity Building for Palestine* mendapat dukungan penuh dari negara peserta NAASP SOM. Delegasi Indonesia, Afrika Selatan dan Palestina terus mengadakan pertemuan informal untuk membahas langkah-langkah lanjut untuk merealisasikan usulan tersebut. Di samping itu Indonesia juga telah mengusulkan 22 proposal konkrit berupa program dan proyek baik di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dalam mengimplementasikan Matriks NAASP. Program-program tersebut mendapat dukungan dari negara peserta dan beberapa negara bersedia untuk menjadi co-sponsor program tersebut.

Meskipun pelaksanaan-NAAS SOM di Durban tidak berjalan dengan kondusif terkait kehadiran Sahara Barat, namun peran Indonesia dalam mengimplementasikan program-program NAASP mendapat pengakuan dari negara peserta.⁶² Beberapa kali dalam pertemuan ini, Indonesia mencoba menengahi perbedaan diantara negara-negara peserta dari Benua Afrika. Hal ini membuktikan keseriusan Indonesia dalam merealisasikan kerjasama Asia Afrika.

Dalam sesi pertemuan Solidaritas Politik, Isu politik yang dibahas adalah mengenai hukum, kejahatan lintas negara *UN Reform*, international Forum, Palestina dan demokrasi.⁶³ Dalam pembahasannya disepakatinya isu baru dalam bidang politik yaitu *peace building* yang dianggap merupakan interpretasi salah satu paragraph *Joint Ministerial Statement*. Masalah Sahara Barat juga diusulkan oleh Afrika Selatan dan negara-negara yang mendukung kehadiran Sahara Barat, namun usulan tersebut

juga dibahas dalam sesi ini. Pertemuan akhirnya sepakat untuk tidak memasukkan paragraf mengenai 2 hal tersebut ke dalam *Report on Political Solidarity*.⁶⁴

Melalui sesi ini, keempat usulan Indonesia disetujui terkait dengan *Asian African Conference Capacity Building for Palestine* yang direncanakan untuk diadakan pada tahun 2007, *Training on Controlled Delivery in Combating Illicit Trafficking an Drugs, Asia - Africa Dialogue on Human Rights*. Kerjasama antara *Jakarta Center for Law Enforcernent Cooperation (JCLEC)* dan *The African Center for Studies and Research on Tercorism* juga disepakati dengan koordinator proyek Indonesia bersama Aljazair.⁶⁵

Pada sesi Kerjasama Ekonomi pembahasan meliputi pertanian, UKM, perdagangan dan investasi, pengentasan kemiskinan, pariwisata, energi dan keuangan. Sesi ini diikuti oleh 38 negara peserta yang menyatakan antusiasmenya dalam menyelenggarakan kerjasama ekonomi.⁶⁶

Indonesia mengusulkan 7 proposal meliputi 6 pelatihan di bidang pertanian antara lain *Business Incubator to Develop Small and Medium Enterprises for Asian and African Countries*, *Training Course on Dairy-Husbandry Technology*, *Training Course on Animal Health*, *Training Course on Poultry* dan *Exchange Visit for Farmers Leaders, Rural Women and Rural Youth Program*.⁶⁷ Jepang menyatakan bersedia mempertimbangkan pendanaan pihak ketiga khususnya untuk 5 proposal yang terkait dengan pertanian. Mengenai Program *Task Force for Feasibility of*

Business Council maupun program visit Year Indonesia mempertimbangkan untuk

menjadi salah satu *Champion countries*, namun akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait.⁶⁸

Pada sesi hubungan sosial budaya, dibahas sejumlah kerjasama yang tertuang dalam matriks yaitu : *Human Resources Development, Scholarship, HRD & Capacity Building, Technology, mass media, People-to-People Contact, GRTKF, Youth & Sport, Disaster Management, Health dan Environment*, sementara isu mengenai *women and youth* diberikan sesi tersendiri.⁶⁹

Sesi menyetujui 12 usulan Indonesia yang terdiri dari beasiswa Darmasiswa dan Kerjasama Teknik Negara berkembang, *International Training Course on TI Education Program Production Using Digital Technology, International Training Course on Information Technology and Education Methodology, Asia Africa Satellite*

2. Kerjasama NAASP dalam kaitannya dengan Palestina

NAASP juga membuktikan komitmen dukungannya terhadap Palestina. Melalui mekanisme NAASP, upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Palestina dapat terlaksana. Indonesia telah menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan *NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* pada tanggal 14 – 15 Juli 2008.⁷⁰ konferensi ini merefleksikan dukungan nyata Indonesia bagi Palestina serta bertujuan untuk menggalang dukungan negara-negara Asia Afrika terhadap perjuangan masyarakat Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatannya.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid* "NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine" 14-15 Juli

Konferensi tersebut dihadiri oleh 218 peserta dari 56 negara dan organisasi internasional, yaitu 53 dari Asia-Afrika (37 Asia dan 13 Afrika), 3 negara Amerika Latin (Brazil, Venezuela dan Chile) serta 3 organisasi internasional (IDB, UNSCWA dan UNRWA). Dimana 9 negara diantaranya, diwakili tingkat menteri, 15 negara lagi tingkat Wakil Menlu, sementara negara-negara lainnya diwakili tingkat pejabat tinggi atau Duta Besar.⁷¹

Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, negara-negara Asia dan Afrika telah memberikan komitmen untuk membantu Palestina untuk kurun waktu 2008-2014. sebagai contoh Afrika Selatan akan melaksanakan *Training for Palestine Diplomats* pada tahun 2010, Brunei Darussalam juga mengusulkan pelatihan teknologi informasi, sementara Uni Emirat Arab yang pada tahun 2008 telah memberikan bantuan finansial sebesar USD 43,000.000.⁷²

Tabel 3.1

Program Pembangunan Kapasitas Palestina oleh Negara-negara Asia Afrika dalam NAASP (2008-2010)

No	Program	Tahun/Periode	Negara Penyelenggara
1.	<i>Training for Palestine Diplomats</i>	2010	Afrika Selatan
2.	Pelatihan Teknologi Informasi	Tbc	Brunei Darusallam
3.	<i>Training on Health Promotion</i>	7-8 Juni 2010	Filipina
4.	<i>Sustainable Crop Production</i>	19 Februari 2010	Thailand
5.	<i>Diversified Farming using Participatory Approaches for Food Security and Safety</i>	19 Februari 2010	Thailand
6.	<i>Public Policy and Economics of Health System Development</i>	19 Februari 2010	Thailand
7.	<i>Health, Environment and Development</i>	19 Maret 2010	Thailand
8.	<i>Tourism in Asia : Development, Management and Sustainability</i>	16 April 2010	Thailand
9.	<i>Integrated Natural Resources and Environment Management in the Context Climate Change</i>	16 April 2010	Thailand
10.	Grassroots Economic Development through the Sufficiency Economy Philosophy	14 Mei 2010	Thailand
11.	<i>Planning and Management of Small Water Supply Systems</i>	14 Mei 2010	Thailand
12.	<i>Groundwater Development and Management</i>	14 Mei 2010	Thailand
13.	USD 80 juta melalui World Bank untuk proyek reformasi dan pembangunan berkelanjutan Palestina.	2008	Kuwait
14.	<i>Training Course in Disaster Management</i>	2008	Malaysia
15.	Scholarship Course in Disaster Management	Setiap tahun	Pakistan
16.	<i>Strengthen Readiness for Primary Education Under the Schme of Enhancing Pedagogy Skills for Teacher Trainers</i>	2008	Singapura
17.	Bantuan finansial (USD. 43.000.000) kepala palestina	2008	Uni Emirat Arab

Pada pertemuan tersebut Indonesia juga telah menyampaikan komitmen untuk memberikan pelatihan bagi 1.000 warga Palestina selama 5 tahun (2008-2013). Hingga pertengahan tahun 2010 Indonesia telah melaksanakan 21 program pelatihan *capacity building* yang diikuti 103 warga Palestina. Pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut dilakukan sebagai komitmen Indonesia atas ditandatangani MoU on Technical Cooperation for Human Resources Development di Jakarta dan hasil dari NAASP *Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine*, 14 Juli 2008.⁷³ Berikut matriks peningkatan kapasitas bagi warga Palestina di Indonesia.

Tabel 3.2
Program Pembangunan Kapasitas Palestina oleh Indonesia
dalam NAASP (2008-2010)

No	Period	Program	Organizer	Total Participants
1	15th April – 19 th April 2008	<i>Business Incubator Small and Medium Enterprises</i>	<i>Technical Cooperation (MFA), ATRA, BPPT</i>	8 person
2	21 st April – 25th April 2008	<i>International Workshop on Women EmPowerment in Economic Development</i>	<i>Technical Cooperation (MFA) and Women EmPowerment Ministry</i>	4 persons
3	23rd-27th June 2008	<i>International Training Program on Microfinance for Asian-African Countries</i>	Technical Cooperation, (MFA)	1 Person
4	16th June – 25th July 2008	<i>Diplomatic Training Program for Palestinian Diplomats</i>	<i>Center for Training and Education (MFA)</i>	9 persons
5	19th – 27th August 2008	<i>Training on Integrated Neo Natal and Choild Health</i>	<i>Technical Cooperation (MFA)</i>	3 persons
6	28th Oct – 31 Oct 2008	<i>Democratization and Good Governance Training</i>	<i>Technical Cooperation, (MFA)</i>	4 persons
7	19 th October – 29th November 2008	<i>Training on Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities</i>	<i>Training on Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities Ministry of Health</i>	2 persons
8	18th-19th November 2008	<i>Asia Africa Conference on Open Sorce</i>	BPPT	1 person

Lanjutan tabel 4.6

9	23rd-28th March 2009	<i>International Training Workshop on Women EmPowermentt in It</i>	<i>Technical Cooperation (MFA) and Women EmPowerment Ministry</i>	2 persons
10	30th March – 24th April 2009	<i>Senior Diplomatic Training Course ASEAN + 3</i>	<i>Center for Training and Education (MFA)</i>	4 persons
11.	13th-24th April 2009	<i>Training on Project Cycle Mnistry of Public Works</i>	<i>Ministry of Public Works</i>	13 persons
12	25th-18th June 2009	<i>Training on Mechanical Piping Engineering Drafting</i>	<i>Ministry of Industry</i>	13 persons
13	29th June-6th July 2009	<i>Training on Local Government Support for Mother and Children Program</i>	<i>Ministry of Foreign Affairs</i>	2 perspns
14	1st July-11th August 2009	<i>Training of Vocational Rehabilitation for Persons with Diplomaties</i>	<i>Ministry of Health</i>	2 persons
15	3rd August 2009 - February 2009	<i>Language Training for Junior Diplomats</i>	<i>Center for Training and Education (MFA) & STB LIA</i>	5 persons
16	28th October-8th November 2009	<i>Restoration and Conservation Document</i>	<i>National Archives, MFA</i>	4 person
17	4th-18th November 2009	<i>The Diplomatic Protocol Training</i>	<i>Center for Training and Eductaion (MFA)</i>	6 persons
18	November 2009-2011	<i>“Basiswa Unggulan” Program</i>	<i>Ministry of National Education</i>	14 persons
19	6th-26th November 2009	<i>Training on Medical First Responder</i>	<i>DKI Province Government</i>	2 persons
20	5th-30th April 2010	<i>5th International Senior Diplomatic Training frim Asian + 3 Countries and Palestine</i>	<i>Ministry of Affairs</i>	1 person
21	March-July 2010	<i>Diplomatic training for Junior</i>	<i>Ministry of Foreign Affairs</i>	3 persons

Total = 21 programs, 103 persons

Sumber : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2010

Sementara pada tahun 2010, terdapat dua pelatihan yang tengah dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri dimana terdapat peserta Palestina yakni pelatihan bagi

Diplomat Senior dan Diplomat Junior dan juga telah diidentifikasi program-program

pelatihan peningkatan kapasitas bagi Palestina oleh masing-masing kementerian/instansi antara lain sbb:⁷⁴

- 1) Training Bahasa Indonesia (Kementerian Luar Negeri c.q. STIBA LIA);
- 2) *Capacity Building on Gender Mainstreaming* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan);
- 3) Beasiswa Unggulan (Kementerian Pendidikan Nasional)
- 4) *Training on Policy Initiatives on SMEs Development*, Juli 2010 (Kemenkop dan UKM).
- 5) *Training on Project Cycle* (Kementerian Pekerjaan Umum);
- 6) *Basic Fire Training* (Pemda DKI).
- 7) Program S-2 Pariwisata, Juli 2010 (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata);
- 8) *TCTP on Vocational Rehabilitation for Person with Disabilities* (Kementerian Sosial);
- 9) Training Program on Business Incubator to Develop SMEs focusing on Creative Industry (Kemlu c.q. Direktorat Kerja Sama Teknik);
- 10) Bahasa Indonesia for Ulama (Kementerian Luar Negeri c.q. Pusdiklat);
- 11) *Training on Coal and Mineral Resources*, Juni 2010 (Kementerian Energi dan

Tabel 3.3
MATRIKS PELAKSANAAN KEGIATAN BAGI PALESTINA
DISELENGGARAKAN OLEH DIREKTORAT KERJASAMA TEKNIK
TAHUN 2008-2009

NO	PGORMAN KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	JUMLAH PESERTA
1	<i>Training Program on Business Incubator to Develop the Palestinian SMEs</i>	15-19 April 2008	Jakarta	8 orang
2	<i>International Workshop on Women EmPowerment in Economic Development : Promoting Women's Productivity</i>	21-25 April 2009	Jakarta	4 orang
3	<i>International Training Program in Micro-Finance for Asian-African Countries : stablishing and managing Micro-Finance Institution</i>	23-27 Juni 2008	Jakarta	1 orang
4	<i>International training Waorskshop on "Democratization and Good Governancè"</i>	28-31 Oktober 2008	Jakarta	4 orang
5	<i>International Training Worskshop on Women EmPowerment on Information Technology</i>	23-27 Maret 2009	Jakarta	2 orang
	Jumlah			19 orang

Sumber : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2008-2009

3. Pertemuan SOM NAASP 2009

Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi New Asian-African Strategic Partneship (NAASP) telah diselenggarakan di Jakarta, 12-13 Oktober 2009.⁷⁵ pertemuan bertujuan untuk membahas beberapa agenda penting yaitu perkembangan NAASP (2005-2009); NAASP *Capacity Building for Palestine*; berbagai pengalaman

⁷⁵ Laporan Pertemuan SOM NAASP, Jakarta, 12-13 Oktober 2009

kerjasama sub-regional Asia-Afrika (Tokyo International Conference on African Development-TICAD, Forum on China-Africa Cooperation-FOCAC, Korea-Africa Forum-KAF, India-Africa Forum-IAF, dan Turkey-Africa Cooperation-TAC); Framework Document hasil pertemuan Presiden RI dan Afrika Selatan di Tshwane, Afrika Selatan, Maret 2008; persiapan NAASP Summit 2010; pembahasan NAASP Co-Chairmanship periode berikutnya (2010-2014); serta penentuan logo website NAASP. Pertemuan dihadiri oleh 164 delegasi dari 60 negara anggota NAASP dengan perincian 36 negara Asia dan 24 dari Afrika.⁷⁶

Pertemuan ini membahas perkembangan NAASP periode tahun 2006-2009 dengan agenda “*Progress of Matrix of the Asian-African Summit 2005 Follow up*” dan “*Outcome of Bali Co-Chairs Meeting in the Eight Focus Areas*”. pada agenda pertama, Indonesia telah menyampaikan realisasi komitmennya berdasarkan *Updated matrix of the Asian African Summit 2005 Follow Up*, tentang berbagai program capacity building di bidang energi, pariwisata, kebudayaan, lingkungan, media massa, perdagangan, pertanian, pelatihan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), beasiswa dan teknologi informasi serta mengharapkan pelaksanaan komitmen negara peserta NAASP lainnya berdasarkan matriks tersebut.

Pertemuan menyepakati untuk mengadopsi dokumen *Jakarta Statement* yang memuat garis-garis besar arah kelanjutan implementasi berbagai program NAASP baik dalam pilar solidaritas politik, kerjasama ekonomi, maupun sosial-budaya.

Termasuk di dalamnya implementasi 8 *Focus Areas* beserta *champion countries* dan

komitmen peningkatan kerjasama antara NAASP dengan berbagai forum kerjasama regional dan sub-regional lainnya.

Selain agenda di atas, dibahas pula *Framework Document on Co-Chairs' Statement on the New Asia-Africa Strategic Partnership*. Dalam pembahasan, sejumlah negara peserta NAASP menyampaikan beberapa masukan untuk mengakomodir aspirasi negara-negara peserta NAASP sebelum dokumen tersebut diusulkan pada NAASP Summit 2010.

Melalui proses pembahasan serta revisi oleh peserta pertemuan, disepakatinya bahwa *Framework Document* tersebut dapat diadopsi oleh NAASP SOM 2009 dengan judul baru, yakni *fundamental Principles, Objectives, Institutional Mechanisms, Procedural and Administrative Guidelines For the New Asian-African Strategic Partnership*.⁷⁷ Selain perubahan judul dokumen dan substansi, negara-negara peserta NAASP juga mengusulkan agar *non-state actor* untuk bertindak sebagai peninjau dalam kegiatan-kegiatan NAASP.

Pada agenda *sharing of Experience with Other Partnership For a Involving Asian-African Countries*, di beberapa forum kerjasama di kawasan Asia-Afrika seperti TICAD, *Forum on China-Africa cooperation (FOCAC)*, *Indo Africa Forum*, *Korea-Africa Forum* dan *Turkey – Africa Cooperation* memberikan paparan mengenai skema kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini, beserta proyeksinya di masa yang akan datang.

Mengenai kemungkinan adanya ketua bersama yang baru periode 2010 – 2014

mengharapkan negara-negara peserta NAASP untuk mengajukan diri. Dalam pembahasan agenda tersebut, Maroko mengajukan diri sebagai kandidat *Co-Chair* NAASP dari Afrika. Pengajuan diri Maroko tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah besar peserta NAASP dari Afrika. Namun kandidat dari Asia belum dapat ditentukan karena belum ada negara dari Asia yang mencalonkan diri sebagai kandidat NAASP *Co-Chair*.⁷⁸

Selain agenda-agenda yang sudah ditentukan, pertemuan juga membahas masalah *International organized crime* yaitu *pricay* dan situasi di Somalia.⁷⁹ Dalam hal ini, Somalia mengharapkan bantuan dan dukungan negara peserta NAASP untuk memberikan bantuan kepada Somalia melalui kegiatan *capacity building* di bidang keamanan, *counter terrorism*, beasiswa dan pelatihan lainnya. Negara peserta NAASP menyambut baik harapan bantuan tersebut dan mengharapkan Somalia untuk menyusun proposal mengenai bantuan yang dibutuhkan seperti yang telah dilakukan oleh Palestina selama ini.

4. Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 the New Asian African Strategic Partnership (NAASP)

Perhelatan akbar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 the New Asian African Strategic Partnership (NAASP) akan diselenggarakan di Afrika Selatan pada pertengahan tahun 2012. Hal tersebut disampaikan Pejabat Tinggi Afrika Selatan pada Pertemuan Pejabat Tinggi Indonesia dan Afrika Selatan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.

Pada pertemuan tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal

Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI, Duta Besar T.M. Hamzah Thayeb. Sementara delegasi Afrika Selatan dipimpin oleh Deputy Direktur Jenderal Asia dan Timur Tengah, Departemen Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Afrika Selatan, Duta Besar Sisa Ngombane. Selain membahas upaya-upaya persiapan penyelenggaraan KTT ke-2 NAASP di Afrika Selatan, pertemuan juga membahas perkembangan kerja sama bilateral Indonesia dan Afrika Selatan, yaitu antara lain: permasalahan domestik dan regional masing-masing negara; rencana pelaksanaan 2nd Joint Bilateral Commission; rencana pembangunan pusat warisan budaya Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan; rencana penandatanganan MoU Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional, Pengembangan Kapasitas antara Kepolisian RI dan Kepolisian Afrika Selatan; serta posisi Indonesia selaku tuan rumah ASEAN 2011.⁸⁰

KTT ke-2 NAASP di Afrika Selatan merupakan tindak lanjut dari KTT Asia Afrika yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, pada 22-23 April 2005 demi memperingati perayaan 50 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955. KTT Asia Afrika di Jakarta tahun 2005 dihadiri oleh 106 negara di kawasan Asia dan Afrika dan menghasilkan kesepakatan pembentukan NAASP melalui Declaration on the New Asian African Strategic Partnership. Pada KTT tersebut Indonesia dan Afrika Selatan, sebagai Ketua Bersama NAASP, menyepakati penyelenggaraan KTT NAASP setiap 4 tahun sekali. Penyelenggaraan KTT ke-2 NAASP adalah tanggung jawab Afrika Selatan selaku Ketua Bersama NAASP dari kawasan Afrika, dan hingga saat ini telah tertunda tiga kali, yaitu pada tahun 2009, 2010 dan 2011.

⁸⁰ Afrika Selatan Tuan Rumah KTT NAASP II Tahun 2012 dalam <http://www.depku.go.id> diakses 11

Dalam kerangka kerja sama Asia Afrika, Konferensi Tingkat Tinggi Asia - Afrika (*Asian-African Summit*) tahun 2005 merupakan suatu keberhasilan Indonesia dalam membangun forum kerja sama antarnegara di kedua benua tersebut, merupakan tantangan sendiri yang harus dihadapi. Kepemimpinan Indonesia dan Afrika Selatan harus dibuktikan dengan langkah konkrit. Dalam kaitan itu, Indonesia telah melakukan serangkaian upaya untuk mengimplementasikan hasil KTT tersebut. Saat ini telah dibuat suatu kerangka acuan kerja sama dalam bentuk matriks kegiatan beris program yang akan dilaksanakan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Sebagai tindak lanjut terhadap KTT Asia-Afrika dan Kesepakatan NAASP di Jakarta, 2005, pada tanggal 18-20 Juni 2007 dilaksanakan Pertemuan Forum Asia Afrika mengenai Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklore atau *AA Forum on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) di Bandung. Pertemuan adalah untuk menyatukan posisi dan menyamakan strategi Asia-Afrika pada Sidang *Intergovernmental Committee (IGC GRTKF) World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada bulan Juli 2007 di markas WIPO Jenewa.

Pertemuan ini menghasilkan satu pernyataan bersama negara-negara Asia-Afrika yang berjudul "Deklarasi Bandung tentang Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, dan Sumber Daya Genetik" yang menekankan pentingnya hak negara terhadap sumber daya genetik, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai aset nasional mereka yang memiliki nilai sosial, budaya dan ekonomi. Deklarasi ini merekomendasikan untuk mempercepat proses pembentuk

demikian menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan. Melalui Forum Asia-Afrika, negara peserta akan mengupayakan agar pembahasan pembentukan mekanisme perlindungan GRTKF diintensifkan dalam berbagai forum internasional. Mereka akan memperkuat koordinasi serta kerja sama di antara mereka dalam upaya melestarikan, melindungi, dan mempromosikan GRTKF. Untuk sektor yang lebih *sophisticated*, Indonesia kini tengah menjajaki kerja sama dengan pihak swasta dalam mengupayakan proyek kerja sama satelit Asia-Afrika. Keikutsertaan sektor swasta dalam kerja sama satelit komunikasi ini diharapkan dapat mendorong peran swasta yang lebih besar dalam kerja sama Asia-Afrika. Kegiatan menonjol yang telah dilaksanakan adalah antara lain penyelenggaraan *Asian-African Conference on Capacity Building for Palestine* dan *Asian-African Communication Satellite dan Asian- African Youth Conference* tanggal 14-18 Juli 2008. Indonesia bekerja sama dengan badan PBB, khususnya UNCTAD sedang mengkaji *needs assessment* serta *pledge* bantuan kongkrit pengembangan *capacity building* sekitar 10.000 warga Palestina khususnya di bidang pembangunan ekonomi, pemerintahan dan infrastruktur. *NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* dihadiri oleh 218 peserta dari 56 negara Asia dan Afrika termasuk 3 negara dari Amerika Latin yaitu: Brazil, Venezuela dan Chile. Konferensi ini melengkapi hasil dari Konferensi Annapolis yang menitikberatkan dukungan politik dan Konferensi Paris yang mengusahakan dukungan keuangan. Konferensi ini juga memanfaatkan momentum yang berasal dari inisiatif Indonesia dan Afrika Selatan untuk membantu rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Indonesia secara khusus memberikan bantuan kepada 1000 orang untuk pelatihan berbagai sektor dalam periode lima